
PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PAD TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**Oleh****Elsi Ata Dawu¹, Adrianus Kabubu Hudang², Yuniarti Reny Renggo³****^{1,2,3}Universitas Kristen Wira Wacana Sumba****E-mail: ¹elshydawu@gmail.com, ²adrianus@unkriswina.ac.id,****³renyrennggo@unkriswina.ac.id**

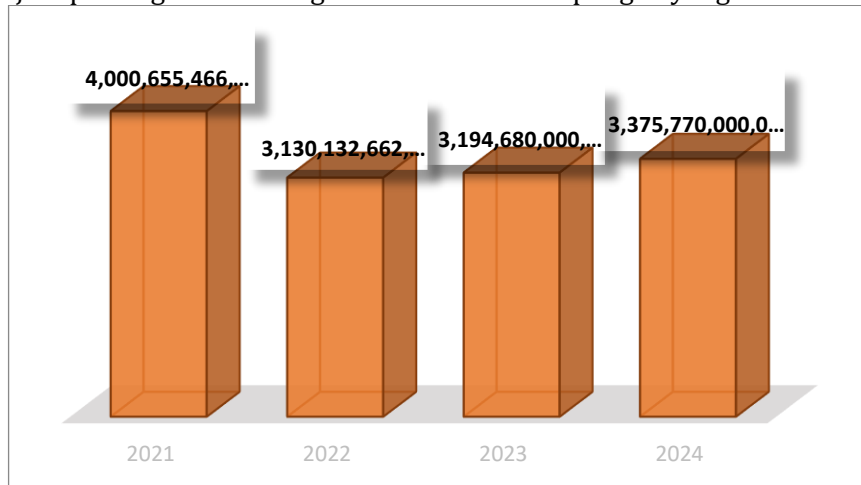
Article History:*Received: 01-02-2026**Revised: 28-02-2026**Accepted: 03-03-2026***Keywords:***PAD; Dana**Perimbangan;**Belanja Daerah*

Abstract: *Tantangan kemandirian fiskal di daerah sering kali tercermin dari besarnya dominasi dana transfer dalam membiayai kebutuhan pembangunan serta operasional. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dengan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan memanfaatkan data panel yang mencakup 21 kabupaten/kota selama periode 2020–2023, analisis dilakukan melalui penerapan Fixed Effect Model (FEM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan belanja daerah karena porsi terbesar pembiayaan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, PAD ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan namun secara statistik tergolong lemah; variabel ini tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, tetapi menunjukkan signifikansi pada tingkat kepercayaan 90%. Hasil ini mengindikasikan bahwa kapasitas belanja daerah di NTT masih sangat bergantung pada dukungan pusat dibandingkan kekuatan pendapatan internal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan potensi sumber daya lokal guna meningkatkan kontribusi PAD terhadap struktur belanja daerah secara mandiri dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Sudah sejak lama Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah dengan didasari UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No.33 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat (Mbuinga et al., 2022). Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di Indonesia (Miranda et al., 2022). Kemiskinan dan keuangan negara memiliki hubungan yang sangat erat, dimana kemiskinan dapat berdampak terhadap keuangan negara. Dan begitu pun sebaliknya keuangan negara dapat berdampak dalam penanggulangan kemiskinan. APBD merupakan salah satu cerminan dimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah mengatur keuangan (Mulyati & Yusriadi, 2018). Perlu diakui jika masih adanya ketidakmerataan kemampuan keuangan dan ekonomi di setiap daerah, sehingga dana transfer merupakan konsekuensi dalam mengatasinya (Prakosa, 2004). Tidak dipungkiri jika di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami ketimpangan keuangan antara kabupaten, terlihat dari indeks gini provinsi NTT menunjukkan angka 0,34 yang

mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang signifikan antar penduduk NTT. Sehingga dana transfer menjadi penting dalam mengatasi masalah ketimpangan yang ada.



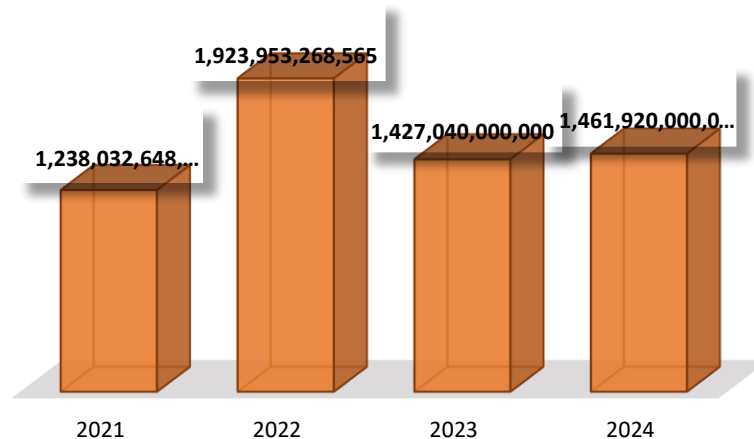
Gambar Error! No text of specified style in document.-1 Pendapatan Transfer Provinsi NTT Tahun 2021 - 2024

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur (2024a, 2025)

Gambar 1-1. menggambarkan bahwa pendapatan transfer Provinsi NTT mengalami fluktuasi selama periode 2021-2024. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2021, diikuti penurunan signifikan pada tahun 2022. Setelah itu, pendapatan kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024, meskipun belum melampaui angka tahun 2021. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, pendapatan transfer pada tahun 2024 (Rp3.375.770.000.000) masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2021 (Rp4.000.655.466.445). Selama periode ini, terjadi penurunan bersih sebesar Rp624.885.466.445.

Dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran krusial dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT, sering kali menjadi sumber pendapatan yang signifikan di samping Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran dana transfer dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Ketika dana transfer mengalami penurunan, seperti yang terlihat antara tahun 2021 dan 2022, daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui peningkatan efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi, serta eksplorasi potensi ekonomi lokal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang sangat erat dan fundamental dengan Belanja Daerah untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tanggung jawabnya. Semakin besar dan stabil PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya untuk membiayai program-program pembangunan, pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur), serta operasional pemerintahan secara mandiri. PAD yang kuat memungkinkan daerah untuk tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, juga mencerminkan kemandirian fiskal daerah dan kapasitas ekonominya yang tumbuh. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, dan pendapatan lain-lain menjadi krusial agar daerah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membiayai belanjanya dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

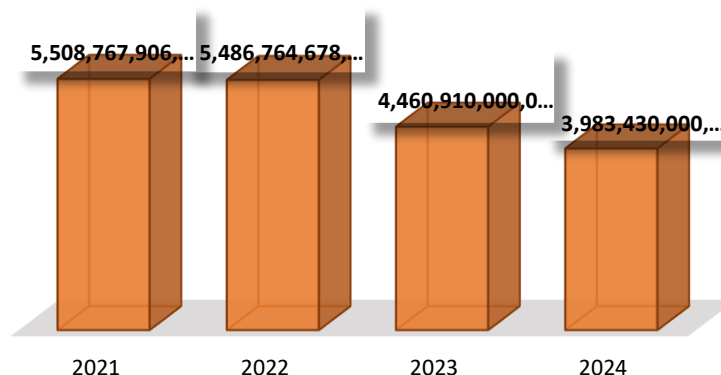


Gambar Error! No text of specified style in document.-2 PAD Provinsi NTT Tahun 2021 – 2024

Sumber : BPS NTT (2024, 2025)

Gambar 1-2. menunjukkan bahwa PAD Provinsi NTT mengalami fluktuasi selama periode 2021-2024. PAD menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun 2021 ke 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan, sebelum kemudian kembali meningkat sedikit pada tahun 2024. Meskipun meningkat di tahun 2024, nilai PAD masih di bawah capaian pada tahun 2022. Periode 2021-2024 menunjukkan dinamika perubahan PAD Provinsi NTT yang cukup menarik. Tahun 2022 menjadi tahun dengan pertumbuhan PAD tertinggi, diikuti oleh penurunan yang substansial pada tahun berikutnya.

Meningkatkan PAD dapat membantu memberikan sumbangan yang besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pada hakikatnya disusun oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fitriyanti & Handayani, 2020). Sehingga pemerintah dapat membiayai Belanja Daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Masdjojo & Sukartono, 2009).



Gambar Error! No text of specified style in document.-3 Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 – 2024

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur (2024a, 2025)

Gambar 1-3. menggambarkan tren penurunan Belanja Daerah Provinsi NTT selama periode 2021-2024, meskipun terdapat sedikit penurunan yang tidak terlalu signifikan antara tahun 2021 dan 2022. Penurunan yang lebih substansial terjadi pada tahun 2023 dan berlanjut hingga tahun 2024.

Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan alokasi anggaran, efisiensi pengeluaran, atau mungkin juga dipengaruhi oleh perubahan pendapatan daerah (baik dari PAD maupun dana transfer).

Latar belakang menunjukkan dinamika keuangan Provinsi NTT selama periode 2021-2024. Pendapatan transfer mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan di tahun 2022 namun kemudian berangsur pulih. PAD menunjukkan peningkatan yang kuat di tahun 2022, namun tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, tren belanja daerah cenderung menurun selama periode ini. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan analisis yang lebih mendalam, perlu dipertimbangkan bagaimana ketiga komponen ini saling berinteraksi dan faktor-faktor ekonomi serta kebijakan yang mempengaruhinya. Misalnya, penurunan pendapatan transfer di tahun 2022 mungkin berkorelasi dengan peningkatan PAD pada tahun yang sama, atau penurunan belanja daerah bisa jadi merupakan respons terhadap perubahan pendapatan.

LANDASAN TEORI

Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran kas daerah dalam satu tahun anggaran yang mengakibatkan pengurangan kekayaan pemerintah daerah. Belanja menurut organisasi mengacu pada unit-unit pengguna anggaran seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Sementara itu, belanja berdasarkan fungsi mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Pengelompokan belanja meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja investasi. Adapun jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lainnya. Secara umum, belanja daerah dikategorikan menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer, dan pengeluaran tak terduga (Mulyati & Yusriadi, 2018). Secara garis besar, Belanja Daerah digunakan untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan daerah, termasuk:

1. Urusan Wajib: Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial.
2. Urusan Pilihan: Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja Daerah biasanya diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, antara lain:

1. Menurut Urusan Pemerintahan

Menurut urusan pemerintahan belanja terdiri dari belanja wajib dan belanja urusan pilihan.

- a. Belanja Urusan Wajib

alokasi anggaran dalam APBD yang diperuntukkan untuk mendanai urusan-urusan pemerintahan daerah yang bersifat mendasar dan wajib diselenggarakan oleh setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat.

- b. Belanja Urusan Pilihan

alokasi anggaran dalam APBD yang diperuntukkan untuk mendanai urusan-urusan pemerintahan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan perdagangan.

2. Menurut Organisasi

Belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah (misalnya, belanja Dinas Pendidikan, belanja Dinas Kesehatan, dll.).

3. Menurut Jenis Belanja (Kelompok Belanja): Klasifikasi ini merupakan pengelompokan belanja

yang paling umum digunakan dan terdiri dari:

- a. Belanja Operasi: Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah, meliputi:
 - Belanja Pegawai (gaji, tunjangan, honorarium)
 - Belanja Barang dan Jasa (alat tulis kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, jasa konsultasi, dll.)
 - Belanja Bunga (pembayaran bunga utang)
 - Belanja Subsidi (bantuan keuangan kepada pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan)
 - Belanja Hibah (bantuan keuangan bersifat sukarela kepada pihak ketiga)
 - Belanja Bantuan Sosial (bantuan keuangan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat)
- b. Belanja Modal: Pengeluaran untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran, meliputi:
 - Belanja Tanah
 - Belanja Peralatan dan Mesin
 - Belanja Gedung dan Bangunan
 - Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Belanja Aset Tetap Lainnya
 - Belanja Tidak Terduga: Pengeluaran untuk kejadian yang tidak terduga (misalnya, bencana alam, kejadian luar biasa lainnya).
 - Belanja Transfer: Pengeluaran berupa dana yang dialokasikan kepada pihak lain, meliputi:
 - Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Pemerintah Desa/Kelurahan
 - Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa/Kelurahan
 - Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah yang bersumber dari potensi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber lainnya. Pertumbuhan PAD perlu terus didorong agar daerah mampu menanggung sebagian besar kebutuhan belanja yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan mendukung kegiatan pembangunan, yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan (Mbuinga *et al.*, 2022). Mbuinga *et al.* (2022) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, dana bagi hasil menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah di wilayah tersebut. Di sisi lain, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. **Pajak Daerah:** Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. **Retribusi Daerah:** Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:** Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
4. **Lain-lain PAD yang Sah:** Merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam tiga komponen di atas, namun sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Perimbangan

Penelitian oleh Aminus (2024) menunjukkan bahwa baik PAD maupun dana perimbangan

memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja daerah, dan artikel ini juga menekankan pentingnya otonomi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan perlunya pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang diambil dari laba APBN dan didistribusikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa transformasi signifikan dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah. Dana perimbangan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bagian daerah dari hasil pembagian pajak pusat. Selain dana perimbangan, Pemda juga memiliki sumber pendapatan lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, dan penerimaan sah lainnya. Pengelolaan dan kebijakan penggunaan seluruh dana tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Pemda (Miranda et al., 2022). Septriani (2023) mengungkapkan bahwa secara parsial, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota yang berada di Provinsi Bengkulu. Dana Perimbangan adalah mekanisme transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri, sehingga daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dana perimbangan secara garis besar terdiri dari (Ernayani, 2017).

Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), secara umum diharapkan memiliki hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi dana perimbangan /dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk berbagai program yang tercermin dalam Belanja Daerah. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, DBH, yang semuanya memiliki tujuan yang berbeda, seperti DAU memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menggunakan keuangan sesuai Pembangunan dari daerah, DAK berfokus pada sektor prioritas nasional. DBH tergantung dari besarnya penerimaan pajak. Sehingga dapat diambil hipotesis bahwa semakin tinggi dana perimbangan akan mampu meningkatkan belanja suatu daerah.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Peningkatan PAD di suatu daerah menunjukkan adanya kemandirian fiskal dari daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih besar dalam pengalokasian dana guna meningkatkan pembangunan daerahnya. PAD bisa terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan kontributor utama dari peningkatan pendapatan. Peningkatan PAD mampu untuk meningkatkan belanja daerah, yang mana dapat digunakan salah satunya untuk peningkatan sarana dan prasarana daerah tersebut (Fernandes & Fauzia, 2022). Semakin tinggi PAD suatu daerah maka akan semakin tinggi pula besaran belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas serta pengaruh antara Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam desain penelitian ini, variabel yang digunakan diklasifikasikan menjadi variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas merupakan variabel yang memberikan pengaruh, menjadi stimulus, atau menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel lain, yang dalam studi ini direpresentasikan oleh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, variabel terikat didefinisikan sebagai variabel yang nilainya dipengaruhi atau yang menjadi akibat

karena adanya keberadaan variabel bebas, di mana dalam konteks penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah Belanja Daerah.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder tersebut berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk)-Kementerian Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *panel* menggabungkan data *time series* dan data *cross section* (Gujarati, 2022). Data *time series*, yakni periode tahun 2021 hingga 2024 di dan data *cross section*, yakni 21 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini, pengaruh antara Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diuji menggunakan Regresi Data Panel. Uji ini didasarkan pada asumsi bahwa variabel yang menyebabkan variabel lain akan memiliki informasi yang lebih dalam memprediksi variabel tersebut di masa depan. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program EViews10. Untuk menguji hipotesis maka diperlukan rumus pengujian statistik yaitu sebagai berikut:

$$BD_{it} = \alpha + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

BD_{it}	:	Belanja Daerah Kabupaten/Kota i pada tahun t (sebagai variabel dependent)
DP_{it}	:	Dana Perimbangan Kabupaten/Kota i pada tahun t
PAD_{it}	:	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota i pada tahun t
α	:	Intersep konstanta kabupaten/kota i
β_1, β_2	:	koefisien regresi
ε_{it}	:	Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Penentuan model yang paling representatif dalam analisis data panel memerlukan proses seleksi yang ketat melalui estimasi beberapa pilihan model statistik. Dalam literatur ekonometrika, terdapat tiga pendekatan utama yang umum digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Ketiga model ini menawarkan asumsi yang berbeda terkait intersep dan kemiringan (*slope*) dalam menangani data lintas unit (kabupaten/kota) dan deret waktu (2020–2023) di Provinsi NTT.

Tahapan seleksi model dimulai dengan penggunaan Uji Chow untuk membandingkan antara Common Effect dan Fixed Effect, guna melihat apakah terdapat pengaruh individu antar kabupaten yang signifikan. Selanjutnya, dilakukan Uji Hausman untuk menentukan pilihan terbaik antara model Fixed Effect dan Random Effect berdasarkan konsistensi dari parameter estimasinya. Terakhir, Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan sebagai instrumen tambahan untuk memverifikasi apakah model Random Effect lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan Common Effect yang sederhana.

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menguji apakah model *common effect model* (CEM) atau *fixxed random effect* (FEM), yang lebih baik untuk digunakan. Berikut hasil uji *chow* dari penelitian ini adalah:

a. Tabel Error! No text of specified style in document.-1

Tabel Uji Chow			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.827001	(21,64)	0.0342
Cross-section Chi-square	41.331981	21	0.0051

Berdasarkan tabel 4.2-1 maka dapat dilihat bahwa probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0.0051 dan lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0.05) yang artinya adalah dari model CEM dan FEM maka yang terbaik untuk dianalisis adalah model FEM.

Model FEM menandakan bahwa model ini mempertimbangkan efek individu tapi waktu tetap. Efek individu mengasumsikan bahwa tiap unit *cross-section* memiliki karakteristik unik yang tidak bisa diobservasi, tapi tetap konsisten dari waktu ke waktu. Sedangkan waktu tetap artinya model tidak fokus pada perubahan antar tahun, tapi pada perbedaan antar daerah, yang dianggap tetap selama periode waktu penelitian.

b. Uji Hausman

Setelah melakukan uji Chow dan model yang terpilih adalah FEM, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji lanjutan untuk melihat apakah model FEM lebih baik dari pada model REM dengan menggunakan uji *hausman*. Berikut hasil uji *hausman* dari penelitian ini adalah:

c. Tabel Error! No text of specified style in document.-2

Tabel Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.162012	2	0.0000

Berdasarkan tabel 4.2-2 disimpulkan dari nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0.05), sehingga model yang terpilih adalah model FEM dibandingkan dengan model *Random Effect Model* (REM).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data sampel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam data sampel untuk mendukung pernyataan atau klaim tertentu tentang populasi.

Agar dapat mengetahui apakah variabel Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Daerah maka perlu untuk melakukan uji signifikan (Rahimah & Chandriyanti, 2020), yang terdiri dari Uji F, Uji R^2 , dan Uji t. Berdasarkan hasil pemilihan model yang terpilih adalah model FEM, berikut persamaan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis:

$\log(BD_{it})$	=	α	+	$\beta_1 \log(DP_{it})$	+	$\beta_2 \log(PAD_{it})$	+	ε_{it}
	=	14.94724	+	0.330583	+	0.144969	+	ε_{it}
Prob.	:			0.0040		0.0872		
R-squared	:	0.793923						
Prob(F-statistic)	:	0.000000						

1. Uji F

Uji F digunakan untuk memprediksi apakah dalam model regresi data panel secara keseluruhan layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dapat juga dilakukan dengan nilai signifikansi (*p-value*). Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.000000, dan itu $\leq \alpha = 5\%$ (0.05). artinya adalah H_0 ditolak atau hasil uji F signifikan, sehingga model regresi data panel layak digunakan. Dengan kata lain menunjukkan Dana Perimbangan dan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi NTT.

2. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel IPM berdasarkan variabel variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari koefisien determinasi adalah mengukur kebaikan model (*goodness of fit*). Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai R^2 adalah 0.793923 yaitu berada pada $0 < R^2 < 1$ Menunjukkan bahwa variasi dalam Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh Dana Perimbangan dan PAD sebesar 79,39%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Angka yang mendekati 0,80 atau 80% ini menandakan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian (*goodness of fit*) yang sangat baik dalam merepresentasikan data di lapangan. Terdapat sekitar 20,61% variasi Belanja Daerah yang tidak mampu dijelaskan oleh Dana Perimbangan maupun PAD dalam model ini. Sisa persentase tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar cakupan persamaan, seperti kebijakan anggaran tak terduga, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pinjaman daerah, atau dana darurat yang tidak termasuk dalam variabel dana perimbangan dan pendapatan asli daerah

3. Uji t

Uji t merupakan uji statistic inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu kelompok berbeda secara signifikan dari nilai tertentu atau dari rata-rata kelompok lain, atau untuk menguji apakah suatu koefisien regresi secara signifikan berbeda dari nol. Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah variabel dana perimbangan dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, dengan melihat nilai probabilitas setiap variabel diperoleh bahwa:

1. Variabel dana perimbangan memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0040, yang $\leq \alpha = 5\%$ (0.05). artinya adalah variabel dana perimbangan signifikan mempengaruhi variabel belanja daerah.

2. Variabel PAD memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0872, yang $\geq \alpha = 5\%$ (0.05) namun lebih kecil dari $\alpha = 10\%$ (0.1). artinya pada tingkat kepercayaan 95%, variabel pendapatan asli daerah dianggap tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap belanja daerah, namun pada tingkat kepercayaan 90% variabel PAD dianggap memiliki pengaruh signifikan, namun ini dapat berarti bahwa variabel PAD lemah secara statistik.

Nilai Konstanta (α) sebesar 14,94724 dalam model ini merepresentasikan titik potong pada sumbu vertikal ketika seluruh variabel independen dalam model, yaitu Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bernilai nol. Dalam konteks analisis data panel logaritma natural, angka ini menggambarkan besarnya nilai dasar logaritma Belanja Daerah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti atau disebut sebagai variabel gangguan (ε_{it}).

Penting untuk dipahami bahwa karena model ini menggunakan transformasi logaritma ($\log$), angka 14,94724 tidak secara langsung merujuk pada nilai nominal Rupiah, melainkan nilai dalam skala logaritma. Secara statistik, konstanta ini menjadi landasan dasar bagi model untuk memprediksi pergerakan Belanja Daerah di Provinsi NTT. Keberadaan nilai konstanta yang positif dan signifikan memberikan validitas bahwa struktur keuangan daerah memiliki basis anggaran operasional yang sudah terbentuk, yang kemudian akan berfluktuasi mengikuti perubahan pada Dana Perimbangan dan PAD sebagai variabel penjelas utama.

Besaran nilai dasar ini jika diubah kembali ke satuan mata uang melalui fungsi eksponensial $e^{14,94724}$ akan menghasilkan nilai sekitar Rp3.090.000 dalam skala logaritma dasar, yang menegaskan adanya batas minimum anggaran yang selalu tersedia dalam sistem fiskal daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan (DP) Terhadap Belanja Daerah (BD) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

$$\log(BD_{it}) = 14.94724 + 0.330583 \log(DP_{it}) + 0.144969 \log(PAD_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien sebesar 0,330583 dan bernilai positif, hal ini

menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel dana perimbangan dan belanja daerah. Artinya setiap kenaikan 1% pada Dana Perimbangan diprediksi akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar kurang lebih 0,33%. Hal ini mengonfirmasi bahwa alokasi belanja di kabupaten/kota di NTT sangat responsif terhadap jumlah dana transfer yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat.

Hubungan searah ini mengonfirmasi bahwa pemerintah kabupaten/kota di NTT sangat mengandalkan ketersediaan dana dari pemerintah pusat untuk mengeksekusi rencana anggaran mereka, sehingga fluktuasi pada dana transfer pusat akan langsung berdampak pada volume belanja di daerah tersebut. Dana Perimbangan merupakan penentu kebijakan belanja yang bersifat nyata dan bukan sekadar kebetulan statistik. Hal ini terlihat sangat jelas pada fenomena di Kabupaten Rote Ndao, di mana lonjakan belanja hingga mencapai Rp2,64 triliun pada tahun 2023 sejalan dengan besarnya alokasi transfer pusat yang diterima pada tahun yang sama.

Karena setiap kenaikan 1% dana pusat hanya mampu mendorong kenaikan belanja sebesar 0,33%, pemerintah daerah harus sangat selektif dalam mengalokasikan "kenaikan" tersebut pada sektor-sektor produktif agar tidak habis hanya untuk belanja rutin. Hal ini terlihat dari data di mana kabupaten dengan belanja besar, seperti Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan, tetap harus menjaga stabilitas belanja mereka agar sesuai dengan fluktuasi dana transfer yang diterima setiap tahunnya.

Secara kritis, dominasi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Provinsi NTT mencerminkan kondisi "*flypaper effect*", di mana pemerintah daerah cenderung lebih responsif membelanjakan dana yang berasal dari transfer pusat dibandingkan dari hasil pendapatan daerah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan ini menciptakan kerentanan anggaran, apabila pemerintah pusat melakukan penundaan transfer, maka stabilitas belanja publik di NTT akan langsung terganggu.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

$$\log(BD_{it}) = 14.94724 + 0.330583 \log(DP_{it}) + 0.144969 \log(PAD_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Variabel pendapatan asli daerah memiliki koefisien sebesar 0,144969 dengan probabilitas 0,0872, dalam model logaritma natural ini, angka tersebut menunjukkan hubungan yang searah (positif). Yang mana Setiap kenaikan 1% pada Pendapatan Asli Daerah diprediksi akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,14%.

Pengaruh ini dianggap signifikan pada level 10% tetapi tidak signifikan pada level standar 5% ($0,0872 > 0,05$). Hal ini mencerminkan bahwa kontribusi PAD terhadap total belanja di NTT masih sangat terbatas dibandingkan dana transfer pusat. Nilai koefisien yang relatif kecil ini (jauh di bawah variabel Dana Perimbangan yang mencapai 0,33) mengindikasikan bahwa kemampuan PAD dalam menggerakkan atau mendanai belanja daerah di NTT masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut selaras dengan data faktual di lapangan, di mana sebagian besar kabupaten di NTT masih memiliki basis PAD yang kecil, seperti Kabupaten Sumba Tengah dan Sabu Raijua yang mencatatkan nilai di bawah Rp30 miliar. Dengan postur belanja daerah yang mencapai angka triliunan rupiah di banyak wilayah, kenaikan PAD yang terbatas belum mampu memberikan dampak yang transformatif terhadap total anggaran belanja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Belanja daerah di provinsi NTT sangat dipengaruhi oleh dana perimbangan, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dana transfer dari pusat akan direspon secara positif oleh peningkatan belanja daerah.
2. Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah di NTT masih signifikan, dimana belanja daerah belum mampu digerakkan secara optimal oleh pendapatan mandiri.

SARAN

Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah:

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)

Berdasarkan hasil analisis pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah masih berada pada level signifikansi marginal (0,0872) dan koefisien yang rendah (0,14), pemerintah daerah harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Fokus utama harus diarahkan pada sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan pajak kendaraan bermotor agar kontribusi pendapatan mandiri dapat lebih kuat dalam mendanai belanja pembangunan, sehingga tidak hanya bergantung pada dana pusat.

2. Peningkatan efisiensi penggunaan dana perimbangan

Berdasarkan hasil analisis Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang sangat dominan (0,33) dan signifikan (0,0040) terhadap postur belanja, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap rupiah dari dana transfer tersebut dialokasikan pada sektor produktif. Perencanaan anggaran harus lebih selektif agar kenaikan dana perimbangan tidak hanya habis untuk belanja rutin atau birokrasi, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah NTT.

3. Penguatan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah

Ketergantungan fiskal yang tinggi menuntut pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas nasional. Hal ini penting untuk memastikan kucuran dana dari pusat tetap stabil dan berkelanjutan, mengingat fluktuasi pada dana perimbangan akan berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah, sebagaimana terlihat pada lonjakan belanja di Kabupaten Rote Ndao tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal Of Economics*, 9(2), 79–90.
- [2] Masdjojo, G. N., & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008. *TEMA: Telaah Manajemen*, 6(1), 32–50.
- [3] Mbuina, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203–3213. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3385>
- [4] Miranda, A., Rizal, Y., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 6(25), 121–128.
- [5] Mulyati, S., & Yusriadi. (2018). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 55–66. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- [6] Prakosa, K. B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Dan Diy). *JAAI*, 8(2), 101–118.
- [7] Aminus, R. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, 9(1), 47–55.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jiegm.v9i1.447>
- [8] Septriani. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 884–894. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>
- [9] Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- [10] Fernandes, J., & Fauzia, L. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada 19 kabupaten/kota di sumatera barat 2017-2020. *Jurnal Revenue*, 3(1), 187–197.
- [11] Gujarati, D. N. (2022). *Essential Of Econometrics* (R. Lee (ed.); Fifth Edit). SAGE Publications.
- [12] Rahimah, & Chandriyanti, I. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 804–818.